



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kondisi pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran, maka perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan OPD;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9);
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2);
- b. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);
- c. Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 11);
- d. Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 13);
- e. Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 18);
- f. Nomor 21 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 21);

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran pada kode rekening belanja, program dan kegiatan pada :
 - a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;

2. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
TRIJOTO SARDJOKO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84

TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SEMARANG TAHUN 2019

DAFTAR RINGKASAN PERUBAHAN KETUJUH PERVAL APBD TAHUN ANGGARAN 2019

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.159.409.774.000	2.159.409.774.000	0	0
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.438.081.250.000	1.438.081.250.000	0	0
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	269.702.349.000	269.702.349.000	0	0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	41.066.960.000	41.066.960.000	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	410.559.215.000	410.559.215.000	0	0
1.2	Dana Perimbangan	1.800.267.767.000	1.800.267.767.000	0	0
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	172.451.167.000	172.451.167.000	0	0
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.288.423.920.000	1.288.423.920.000	0	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	339.392.680.000	339.392.680.000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	789.571.539.000	805.041.539.000	15.470.000.000	1,96
1.3.1	Pendapatan Hibah	120.420.375.000	120.420.375.000	0	0
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	585.707.338.000	585.707.338.000	0	0
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	15.470.000.000	15.470.000.000	100
1.3.4	Dana Insentif Daerah	83.443.826.000	83.443.826.000	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.749.249.080.000	4.764.719.080.000	15.470.000.000	0,33
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.828.438.699.000	1.828.438.699.000	0	0
2.1.1	Belanja Pegawai	1.728.042.731.000	1.728.042.731.000	0	0
2.1.2	Belanja Hibah	69.795.460.000	69.795.460.000	0	0

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	23.372.000.000	23.372.000.000	0	0
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	2.228.508.000	2.228.508.000	0	0
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
2.2	Belanja Langsung	3.305.989.075.000	3.321.459.075.000	15.470.000.000	0,47
2.2.1	Belanja Pegawai	132.214.754.900	132.390.294.900	175.540.000	0,13
2.2.2	Belanja Barang Jasa	1.958.547.288.161	1.972.565.295.161	14.018.007.000	0,72
2.2.3	Belanja Modal	1.215.227.031.939	1.216.503.484.939	1.276.453.000	0,11
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.134.427.774.000	5.149.897.774.000	15.470.000.000	0,30
	Surplus / Defisit Belanja Daerah	(385.178.694.000)	(385.178.694.000)	0	0
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0
3.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
3.2.3	Dana Bergulir	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	385.178.694.000	385.178.694.000	0	0
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN KETUJUH PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
1		DINAS PEKERJAAN UMUM			DINAS PEKERJAAN UMUM				
		1.1.03.1.1.03.01.41.013	Pengembangan Dekorasi Kota	15.000.000.000	1.1.03.1.1.03.01.41.013	Pengembangan Dekorasi Kota	2.000.000.000	(13.000.000.000)	
		5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000.000	5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000.000	(13.000.000.000)	
		5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.000.000.000	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.000.000.000	(13.000.000.000)	
		5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	15.000.000.000	5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	2.000.000.000	(13.000.000.000)	
Jumlah Per OPD				15.000.000.000			2.000.000.000	(13.000.000.000)	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
2		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
		1.2.13.1.2.13.01.19.033	Penyelenggaraan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	15.181.800.000	1.2.13.1.2.13.01.19.033	Penyelenggaraan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	28.181.800.000	13.000.000.000	
		5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.050.000	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	169.200.000	114.150.000	
		5.2.1.01	Honorarium PNS	55.050.000	5.2.1.01	Honorarium PNS	57.200.000	2.150.000	
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000	50.000.000	
		5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	51.850.000	5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	4.000.000	(47.850.000)	
		5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	3.200.000	5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	3.200.000	0	
		5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	112.000.000	112.000.000	
		5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.000.000	112.000.000	
		5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.126.750.000	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.012.600.000	12.885.850.000	
		5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.011.550.000	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.800.000	(14.892.750.000)	
		5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	15.000.000.000	5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	0	(15.000.000.000)	
		5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	0	
		5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	11.100.000	5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	103.350.000	92.250.000	
		5.2.2.01.20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	0	5.2.2.01.20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	0	0	
		5.2.2.01.40	Belanja Perlengkapan Kesehatan	0	5.2.2.01.40	Belanja Perlengkapan Kesehatan	15.000.000	15.000.000	
		5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.400.000	38.400.000	
		5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.900.000	34.900.000	
		5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.500.000	3.500.000	
		5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	86.400.000	78.900.000	
		5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	7.500.000	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	86.400.000	78.900.000	
		5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.250.000	48.250.000	
		5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0	5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.900.000	2.900.000	
		5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	0	5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	15.000.000	15.000.000	
		5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0	5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	30.350.000	30.350.000	
		5.2.2.10.13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	0	5.2.2.10.13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	0	0	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
		5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	28.500.000	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	122.950.000	94.450.000	
		5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	28.500.000	5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	122.950.000	94.450.000	
		5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.544.600.000	27.494.600.000	
		5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	27.544.600.000	27.494.600.000	
		5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000	0	
		5.2.2.47.01	Honorarium Tenaga Ahli	7.200.000	5.2.2.47.01	Honorarium Tenaga Ahli	7.200.000	0	
		5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000	10.000.000	
		5.2.2.07.08	Belanja sewa sound system	0	5.2.2.07.08	Belanja sewa sound system	10.000.000	10.000.000	
		5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	14.000.000	14.000.000	
		5.2.2.48.02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	0	5.2.2.48.02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	14.000.000	14.000.000	
Jumlah Per OPD				15.181.800.000			28.181.800.000	13.000.000.000	
JUMLAH TOTAL				30.181.800.000			30.181.800.000	0	

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI